

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-4 Bulan Februari 2021 (tanggal 19 s.d. 25)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA PEMULIHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Yuni Sudarwati

Peneliti Muda/Manajemen dan Kebijakan

yuni.sudarwati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian lesu, salah satu yang terimbas adalah UMKM. Banyak UMKM harus beradaptasi dengan mengurangi pegawai, menurunkan biaya produksi dan operasional usaha, serta berganti usaha demi bisa bertahan hidup. Gempuran produk impor semakin melemahkan posisi UMKM. Produk impor menjadi lebih menarik karena dari sisi harga produk tersebut lebih kompetitif. Hal ini karena kebijakan di negara asal produk mereka sudah terintegrasi, baik industri kecil, sedang, maupun besar sehingga skala ekonomi bisa terus ditingkatkan. Selain itu, tentunya dukungan kebijakan yang lebih *business-friendly*, paket stimulus, dan program-program pendukung lainnya sehingga produk bisa dikembangkan dan diproduksi secara lebih efisien.

Di sisi lain, daya beli masyarakat akibat pandemi juga melemah sehingga masyarakat lebih sensitif terhadap harga. Sementara keberadaan UMKM akan sangat tergantung pada tingkat daya beli masyarakat, strategi jitu mengenai bagaimana cara meningkatkan daya beli tersebut perlu segera ditetapkan untuk bisa membantu pemulihannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi lain agar masyarakat setelah daya belinya terdongkrak tetap memilih produk dalam negeri khususnya produk UMKM bukan sebaliknya produk impor. Terakhir, tersedianya data tunggal UMKM yang akurat akan sangat membantu ketepatan intervensi bagi UMKM.

FUNGSI DPR

Anggaran:

Memberikan dukungan anggaran untuk melakukan inovasi sehingga produk UMKM bisa diproduksi secara lebih efisien serta memberikan dukungan agar belanja pemerintah dapat digunakan untuk mengoptimalkan UMKM.

Pengawasan:

1. Melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran PEN bagi UMKM dan KUR
2. Memastikan bahwa stimulus yang diberikan dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan.
3. Mendukung dan mengawasi pembuatan data tunggal UMKM.

ATENSI DPR RI

Pemulihan UMKM sangat membutuhkan dukungan mulai dari hilir hingga ke hulu. Menciptakan inovasi agar proses produksi lebih efisien sehingga dapat menekan harga jual menjadi salah satu upaya yang harus segera dilaksanakan. Selain itu peningkatan daya beli masyarakat yang tentu saja sangat terhubung dengan sektor lain juga mendesak. Aspek lain, bantuan dalam peningkatan kapasitas seperti penjualan *online* misalnya, juga dibutuhkan sehingga UMKM dapat melayani masyarakat tanpa terbatas wilayah dan waktu.

DPR RI, *c.q.* Komisi VI harus mendukung dan mengawal kebijakan dan program pemulihan UMKM. Dukungan tersebut mulai dari dukungan anggaran, pengawasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan contoh dalam penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.

SUMBER

Kompas, 20, 22, 24 Februari 2021; Bisnis Indonesia, 22 Februari 2021.